

EVALUASI KEBIJAKAN TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA (TMMD) KE-99 DALAM PEMBANGUNAN DESA DI DESA RANOLAMBOT KECAMATAN KAWANGKOAN BARAT KABUPATEN MINAHASA

*Patrick Nazaret Marunduh¹
Michael Mantiri²
Alfon Kimbal³*

Abstrak

TNI adalah Tentara Rakyat, demikian juga TNI-AD yang menjadi salah satu komponen TNI adalah Tentara Rakyat. Untuk itu TNI-AD harus selalu berada bersama rakyat, memperhatikan dan melindungi rakyat, berjuang bersama rakyat dan untuk kepentingan rakyat dalam upaya melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Evaluasi kebijakan TNI Manunggal Membangun Desa dalam Peningkatan Pembangunan di Desa Ranolambot Kecamatan Kawangkoan Barat, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode observasi wawancara dengan informan, studi dokumen, analisis data ini dilakukan sepanjang penelitian ini berlangsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program TMMD ke-99 pada tahun 2017 di Kodim 1302 Minahasa yang dilaksanakan di desa Ranolambot secara keseluruhan berjalan secara efektif dimana dari laporan kegiatan dari target perencanaan dan hasil telah sesuai. Keberhasilan ini diawali dengan keseriusan TNI dalam melaksanakan program. Dari segi efisiensi anggaran, pelaksanaan program TMMD telah menyerap anggaran 100%, dari segi pelayanan public sangat baik, didukung pula dengan anggaran yang cukup dari pihak TNI dalam penyelenggaraan program kegiatan.

Kata Kunci : Evaluasi Kebijakan, TNI Manunggal Membangun Desa, Pembangunan.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat.

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

Pendahuluan

TNI lahir dan tumbuh bersama-sama rakyat yang selalu mengutamakan kepentingan rakyat. Oleh karena itu TNI yang merupakan salah satu komponen nasional dalam keadaan bagaimanapun dituntut mampu menjamin tetap tegaknya NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dan mengamankan penyelenggaraan pembangunan nasional dalam rangka pencapaian tujuan nasional secara bertingkat, dan berlanjut. Dalam UU TNI No. 34 Tahun 2004 Pasal 7 ayat (1) tentang tugas pokok TNI disebutkan bahwa: Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang yang salah satunya adalah membantu tugas pemerintah daerah. Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah disebutkan beberapa urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah antara lain perencanaan dan pengendalian pembangunan, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dan penyediaan sarana dan prasarana.

Meski dwifungsi TNI telah lama dihapuskan, bukan berarti peran TNI memberdayakan kesejahteraan masyarakat ditinggalkan begitu saja. Lewat program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) diharapkan akan semakin membantu percepatan

(akselerasi) pembangunan daerah tertinggal dan sebagai tindak lanjut dari tugas TNI pada tahun 2008 panglima TNI mengeluarkan Keputusan Panglima TNI Nomor Perpang/23/IV/2008 tanggal 30 April 2008 tentang Organisasi dan Tugas TNI Manunggal Membangun Desa. Program TMMD dilaksanakan sebagai upaya membantu pemerintah dalam memberdayakan wilayah pertahanan dan membantu tugas pemerintah di daerah dalam meningkatkan akselerasi pembangunan di daerah, membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memantapkan wawasan kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam rangka mewujudkan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Seperti yang dikatakan oleh Kasdam I/BB bahwa program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) diharapkan pemberdayaan masyarakat desa dalam mewujudkan ketahanan dan ketangguhan wilayah diharapkan mampu diwujudkan serta mempersatukan bangsa. Program ini juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memantapkan wawasan kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga diharapkan mampu menjawab aspirasi dan kepentingan warga desa, sehingga dapat mengurangi keresahan masyarakat terhadap minimnya sarana dan prasarana.

Kegiatan TMMD sarannya adalah pembangunan fisik dan nonfisik, terutama pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana umum lain yang menjadi kebutuhan masyarakat di daerah, seperti jalan, rumah ibadah, sekolah, dll. Contoh pembangunan non fisik antara lain seperti penyuluhan-penyuluhan, pemberantasan narkoba dan penyakit sosial masyarakat,

peningkatan sarana dan mutu pendidikan, modernisasi pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan, revitalisasi agrobisnis, pemberdayaan industri kecil dan menengah (IKM), meningkatkan ekonomi nelayan, dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Sasaran non fisik, diarahkan untuk mendorong tumbuhnya inovasi dan kreatifitas masyarakat desa guna meningkatkan kualitas hidup dalam membangun daerahnya sendiri menuju kehidupan sosial yang lebih maju, sejahtera, dan mandiri.

Desa Ranolambot merupakan salah satu desa yang ada di Kabupaten Minahasa yang masuk dalam wilayah kodim 1302 dan Kodam XIII Merdeka merupakan lokasi penyelenggaraan TNI Manunggal Membangun Desa ke 99 bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Minahasa yang diselenggarakan mulai 4 Juli 2017 sampai dengan 2 Agustus 2018 dengan beberapa agenda seperti dari himpunan data awal menurut Dandim 1302 Minahasa Letkol Inf Juberth Purnama mengatakan sejumlah program yang dilaksanakan selama TMMD yaitu perintisan dan pengerasan jalan perkebunan sepanjang 1.750 meter, pembuatan talud sepanjang 200 meter dan saluran air sepanjang 1.755, pagar gereja Imanuel Ranolambot sepanjang 100 meter, saluran air gereja sepanjang 300 meter, jamban sebanyak 16 unit, dan penghijauan sebanyak lima ribu pohon.

Tinjauan Pustaka **Evaluasi Kebijakan**

Evaluasi kebijakan adalah penilaian secara menyeluruh input, proses, output, dan outcomes dari kebijakan pemerintah daerah. Melalui evaluasi akan diketahui apakah kebijakan yang ditetapkan berhasil mencapai

tujuannya atau tidak. Jika berhasil sejauh mana tingkat keberhasilannya, jika gagal mengapa terjadi kegagalan. Evaluasi juga dipakai untuk mengetahui sejauh mana kinerja dan akuntabilitas para pelaksana kebijakan. Disamping itu, evaluasi juga digunakan sebagai umpan balik bagi para perumus dan pembuat kebijakan untuk penyempurnaan lebih lanjut. (Wuysang, 2014:13)

Kemudian pengertian Evaluasi Kebijakan juga dapat dilihat dari pengertian berikut: “Menurut Mustofadijaja dalam Widodo (2012:111) evaluasi kebijakan merupakan kegiatan untuk melihat dan menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kebijakan public. Oleh karena itu evaluasi merupakan kegiatan pemberian nilai atas sesuatu “fenomena” didalamnya terkandung pertimbangan nilai tertentu.

Evaluasi kebijakan public merupakan suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan public dapat membuahkan hasil, yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan atau target kebijakan public yang ditentukan. (Muhadjir dalam Widodo, 2012:112)

Menurut Dunn dalam Mulyadi (2015:91) salah satu fungsi dari evaluasi kebijakan public adalah evaluasi kebijakan harus bisa memberi informasi yang valid dan dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan nilai dan kesempatan telah dicapai melalui tindakan public. Fungsi-fungsi lain Evaluasi Kebijakan menurut Samudra dkk dalam Nugroho (2008:186-187), Evaluasi Kebijakan Publik memiliki empat fungsi, yaitu:

- (1) Ekspansi. Melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola lingkungan antar berbagai dimensi realitas yang diamatinya. Dari evaluasi ini evaluator dapat mengidentifikasi masalah, kondisi, dan actor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan program.
- (2) Kepatuhan. Melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya sesuai dengan standard an prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan.
- (3) Audit. Melalui evaluasi dapat diketahui, apakah output benar-benar sampai ketangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada kebocoran atau penyimpangan.
- (4) Akunting. Melalui evaluasi dapat diketahui, apa akibat social ekonomi dari kebijakan tersebut.

TNI

Tentara Nasional Indonesia atau biasa disingkat TNI adalah nama sebuah angkatan perang dari negara Indonesia. Pada awal dibentuk bernama Tentara Keamanan Rakyat (TKR) kemudian berganti nama menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI) dan kemudian diubah lagi namanya menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) hingga saat ini.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) terdiri dari tiga angkatan bersenjata, yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. TNI dipimpin oleh seorang Panglima TNI, sedangkan masing-masing angkatan dipimpin oleh seorang Kepala Staf Angkatan. salah satu dari tugas pokok TNI selain perang yaitu membantu tugas dari pemerintahan daerah. Maksud dari membantu tugas

pemerintah di daerah adalah membantu pelaksanaan fungsi pemerintahan dalam kondisi dan situasi yang memerlukan sarana, alat, dan kemampuan TNI untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi, antara lain membantu mengatasi akibat bencana alam, merehabilitasi infra struktur, serta mengatasi masalah akibat pemogokan dan konflik komunal. (Wikipedia.com.28 september 2018)

Sarana yang dimaksud di sini adalah segala sesuatu yang dimanfaatkan untuk mencapai tujuan. Salah satu sarana yang dimiliki oleh TNI adalah adanya rumah sakit TNI yang tidak hanya diperuntukkan bagi anggota TNI tetapi dapat dimanfaatkan juga oleh masyarakat lain. Apabila terjadi bencana di suatu daerah, maka rumah sakit tersebut dapat digunakan sebagai tempat untuk menolong korban bencana alam dan tenaga medis yang ada akan siap membantu. Selain itu sarana lain yang dimiliki oleh TNI dalam hal ini dapat dilihat dari adanya Koramil (Komando Rayon Militer) di setiap di daerah tingkat kecamatan atau posko-posko yang dibangun oleh TNI. Adapun kegunaan dari sarana tersebut yaitu apabila terjadi bencana alam atau konflik, maka tempat tersebut dapat dijadikan sebagai lokasi untuk menyimpan bantuan berupa makanan, pakaian, obat-obatan atau bantuan lainnya yang diperlukan.

Alat adalah suatu benda yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu. Dalam hal membantu pemerintah daerah, TNI mempunyai sejumlah peralatan yang dapat digunakan apabila diperlukan oleh pemerintah daerah. Adapun alat-alat yang dapat digunakan tersebut antara lain truk, pesawat, helikopter, ambulans, kapal, dll. Apabila terjadi bencana di suatu daerah, maka peralatan yang dimiliki oleh TNI

tersebut sangat diperlukan, misalnya truk TNI dapat digunakan untuk mengevakuasi warga, Pesawat, helikopter, ataupun kapal dapat digunakan untuk mengirimkan bantuan dan evakuasi korban ke daerah yang sulit dijangkau. Begitu juga dengan ambulans TNI dapat digunakan untuk mengevakuasi korban.

Dari segi kemampuan yang dimiliki oleh TNI dalam membantu pemerintah daerah adalah segenap kemampuan atau kekuatan yang dimiliki oleh TNI. Kemampuan ini menuntut keprofesionalitasan seorang anggota TNI. Seorang anggota TNI tidak hanya memiliki kemampuan dalam mengoperasikan senjata atau dalam bidang pertahanan, tetapi ia juga memiliki kemampuan lain yang dapat digunakan bagi kegiatan operasi selain perang. Apabila terjadi konflik atau separatistis di daerah, maka dengan segenap kemampuan yang di miliknya, maka TNI akan berupaya untuk menghentikan konflik tersebut. Kemampuan TNI yang juga dimilikinya adalah dari segi kesehatan. Dalam TNI sendiri tersedia tenaga kesehatan yang tidak hanya diperuntukkan bagi anggota TNI itu sendiri, tetapi juga bagi seluruh masyarakat. Tidak jarang tim kesehatan ini diturunkan di daerah konflik maupun bencana. Bahkan salah satu Batalyon yang dimiliki oleh TNI yaitu Batalyon Zeni Tempur memiliki kemampuan khusus, di mana anggotanya memiliki kemampuan dalam membangun konstruksi jalan, jembatan, perumahan, dll. Kemampuan TNI ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dalam mempercepat proses pembangunan daerah.

Metode Penelitian

Ditinjau dari jenis datanya, pendekatan yang dipakai dalam

penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Yang dimaksud dengan pendekatan kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami sebuah fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi, dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai sumber metode ilmiah (Moleong, 2007:6).

Penelitian ini akan berusaha menjawab permasalahan pokok yaitu: Peranan dari Tentara Manunggal Membangun Desa di Desa Ranolambot keberhasilan dan kendala dari program-program pembangunan fisik dan non fisik yang telah dilaksanakan. Penelitian ini menggunakan teori dari Dunn Mengenai kriteria-kriteria yang harus diperhatikan dalam evaluasi kebijakan:

- 1) Efektifitas (Effectiveness)
- 2) Efisiensi (Efficiency)
- 3) Kepuasan (Responsiveness)
- 4) Manfaat (Appropriateness)

Adapun beberapa informan yang direncanakan akan diwawancarai oleh peneliti adalah:

1. Danramil
2. 1 Tokoh Masyarakat,
3. Kepala Desa dan
4. 5 Masyarakat Desa.

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dokumen laporan pelaksanaan kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Ke-99 TA 2017 Di Wilayah KODAM XIII/MDK, berikut penelitian ini akan dibahas berdasarkan teori yang telah dibahas pada foku penelitian yakni dengan menggunakan teori dari Dunn Mengenai kriteria-kriteria yang harus diperhatikan dalam evaluasi kebijakan dalm hal ini kegiatan TMMD

ke 99 tahun 2017 di Kodam XIII Merdeka lebih khusus di wilayah KODIM 1302/Minahasa Korem 131 Santiago yang berlokasi di Desa Ranolambot Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa:

1. Efektifitas (Effectiveness)

Efektif tidaknya suatu kebijakan, sangat bergantung pada perencanaan kegiatan tersebut, dengan perencanaan yang matang, maka kegiatan tersebut dapat dipasttikan mudah untuk dilaksanakan karena telah melalui proses analisis, begitu juga dengan pelaksanaan TMMMD ke 99 di wilayah Kodin 1302 Minahasa yang berlokasi di Desa Ranolambot, berdasarkan buku rencana program TMMMD ke-99 Kodam XIII/MDK perencanaan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kodim 1302/Min Korem 131/Stg:
 - a) Lokasi sasaran : Desa Ranolambot Kec. Kawangkoan Barat Kab. Minahasa;
 - b) Sasaran fisik.Perintisan dan pengerasan jalan sepanjang 1.750 m x 4 meter;
 - c) Sasaran non fisik:
 - (1)Penyuluhan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara;
 - (2)Penyuluhan Kesadaran bela Negara dan cinta tanah air;
 - (3)Penyuluhan wawasan kebangsaan;
 - (4)Penyuluhan tentang pengetahuan Kesehatan;
 - (5)Penyuluhan Pendidikan Seni Budaya, Olahraga dan Pariwisata;
 - (6)Penyuluhan KB Kes, HIV/Aids dan pengobatan gratis;
 - (7)Penyuluhan Penghijauan, lingkungan hidup, kebersihan dan ketrampilan;
 - (8)Penyuluhan Penanggulangan bencana, kependudukan dan pertahanan;

(9)Ceramah tentang Kerukunan Antar Umat Beragama;

(10) Sosialisasi UU No 22 Th 2009 dan UU No 34 Th 2004; dan

(11) Pemutaran Film Perjuangan.

Pada pelaksanaan TMMMD ke-99 dimulai pada bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Agustus 2017. Dengan mengerahkan personel TNI dalam rangka realisasi pelaksanaan program tersebut. Adapun jumlah personel yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan TMMMD ke-99 di desa Ranolambot.

Dari penelusuran dokumen serta hasil wawancara dengan para informan dapat terlihat bahwa pelaksanaan TMMMD ke-99 di Desa Ranolambot ini berjalan dengan efektif.

2. Efisiensi

Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara input (masukan) dan output (hasil antara keuntungan dengan sumber-sumber yang dipergunakan), seperti halnya juga hasil optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber yang terbatas. Dengan kata lain hubungan antara apa yang telah diselesaikan. (hasibuan 2009:233). Efisien (daya guna) adalah proses penghematan 7M + 1I (ma, money, material, machines, methods, marketing, minutes + informasi) dengan cara melakukan pekerjaan dengan benar (do things right), sedangkan efektif (hasil guna) adalah tingkat keberhasilan pencapaian tujuan (outcomes)dengan cara melakukan pekerjaan yang benar (do the right things) (Husman, 2011:2). Dalam penelitian ini diartikan efisien sebagai pencapaian hasil optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber yang terbatas. Anggaran adalah rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu

dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang. Secara garis besar anggaran merupakan alat manajemen untuk mencapai tujuan. Sehingga dalam proses penyusunan dibutuhkan data dan informasi, baik yang bersifat terkendali maupun yang bersifat tak terkendali untuk dijadikan bahan taksiran. Hal ini disebabkan karena data dan informasi tersebut akan berpengaruh terhadap keakuratan taksiran dalam proses perencanaan anggaran. Julita, 2011 dalam (Pinatik 2015:34).

3. Kepuasan (Responsiveness)

Kepuasan merupakan fungsi dari perbedaan antara kinerja yang dirasakan dengan harapan. Apabila kinerja di bawah harapan, maka masyarakat akan kecewa. Bila kinerja sesuai dengan harapan, maka masyarakat akan puas. Sedangkan bila kinerja melebihi harapan, masyarakat akan sangat puas. Harapan masyarakat dapat dibentuk oleh masyarakat masa lampau, komentar dari kerabatnya serta janji dan informasi pemasar dan saingannya. Masyarakat yang puas akan setia lebih lama, kurang sensitif terhadap harga dan memberi komentar yang baik tentang organisasi publik.

Menurut Lupiyoadi (2006: 155), faktor utama penentu kepuasan masyarakat adalah persepsi terhadap kualitas jasa. Apabila ditinjau lebih jauh, pencapaian kepuasan masyarakat melalui kualitas pelayanan dapat ditingkatkan dengan beberapa pendekatan sebagai berikut:

- a. Memperkecil kesenjangan yang terjadi antara pihak manajemen dengan pihak masyarakat
- b. Organisasi publik harus mampu membangun komitmen bersama untuk menciptakan visi di dalam perbaikan proses pelayanan
- c. Memberikan kesempatan pada masyarakat untuk menyampaikan

keluhan dengan membentuk sistem saran dan kritik

- d. Mengembangkan pelayanan untuk mencapai kepuasan dan harapan masyarakat

Untuk mengetahui tingkat kepuasan dalam pelaksanaan program TMMD di Desa Ranolambot informan yang dipakai dalam penelitian ini hanyalah unsur masyarakat dan kepala desa saja.

4. Manfaat (Appropriateness)

Menurut Agustiono (2012:191) dalam memantau keluaran serta dampak kebijakan harus diingat bahwa kelompok sasaran tidak selalu merupakan kelompok penerima. Kelompok sasaran (target group) adalah individu, masyarakat atau organisasi yang hendak dipengaruhi oleh suatu kebijakan dan program, sedangkan penerima (beneficiaries) adalah kelompok yang menerima manfaat atau nilai dari kebijakan tersebut. Kelompok sasaran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah masyarakat dan pemerintah desa Ranolambot.

Menurut Winarno (2008:225) Bila kebijakan dipandang sebagai suatu pula kegiatan yang berurutan, maka evaluasi kebijakan merupakan tahap akhir dalam proses kebijakan. Namun demikian, ada beberapa ahli yang mengatakan sebaliknya bahwa evaluasi bukan merupakan tahap akhir dari proses kebijakan publik. Pada dasarnya, kebijakan publik dijalankan dengan maksud tertentu, untuk meraih tujuan-tujuan tertentu yang berangkat dari masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Evaluasi dilakukan karena tidak semua program kebijakan publik meraih hasil yang diinginkan. Seringkali terjadi, kebijakan publik gagal meraih maksud atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, evaluasi

kebijakan ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan publik yang telah dijalankan meraih dampak yang diinginkan. Dalam bahasa yang lebih singkat evaluasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menilai “manfaat” suatu kebijakan. Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak.

Kesimpulan

1. Manfaat kegiatan TMMD ke-99 di Desa berbanding lurus dengan Tingkat kepuasan masyarakat. Dengan adanya program fisik dan non fisik memberikan dampak kepada masyarakat dan memberikan kesan positif institusi TNI dimata masyarakat.
2. Tingkat kepuasan masyarakat dari hasil kerja TNI pada program TMMD ke 99 yang dilaksanakan di Desa Ranolambot ini tergolong sangat memuaskan. Karena dengan adanya kegiatan ini, masyarakat merasa senang dengan hasil yang ditinggalkan, ditambah lagi dengan terpilihnya desa ranolambot dari sekian banyak desa di Minahasa menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat desa.

Saran

1. Disarankan kepada Pihak TNI, agar tetap secara kontinu dan konsisten serta merata di wilayah Negara Kesatuan Republic Indonesia terlebih khusus di wilayah Provinsi Sulawesi Utara.
2. Selain program fisik dan non fisik dalam program TMMD, disarankan agar TNI dan masyarakat dipikirkan

program jangka Panjang kepada masyarakat melalui pembekalan usaha dan pertahanan melalui pembangunan pos atau tugu peringatan kegiatan TMMD, karena kegiatan ini kemungkinan tidak akan terulang lagi di desa yang sama.

3. Melalui kegiatan TMMD ke-99 diharapkan pemerintah Desa Ranolambot dan masyarakat melestarikan dan mengembangkan apa yang telah dibangun melalui program ini baik program fisik dan non fisik. Secara berkelanjutan melaksanakan kegiatan bela negara dan cinta tanah air.
4. Agar manfaat dapat dirasakan oleh banyak orang dengan adanya kegiatan TMMD ini, disarankan untuk dapat melibatkan minimal 2 desa dalam sekali pelaksanaan program kegiatan, mengingat anggaran dan jumlah personel yang digunakan cukup besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiman, Arif. 2006. Kebebasan, Negara, Pembangunan: Kumpulan Tulisan 1965-2005. Jakarta: Pustaka Alvabet
- Brown, P and Levinson, S. C. 1987. Politeness: Some Universals in Language Usage (Studies in Interactional Sociolinguistics). Cambridge: Cambridge University Press.
- Dunn, William N. 2007. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Edisi keempat Diterjemahkan oleh Samodra Wibawa dkk. Yogyakarta: Gajahmada University Press.
- Husaini Husman. 2011, Manajemen Teori Praktik dan Riset Pendidikan, (Jakarta: PT Bumi Aksara), cet ke-3

- Moleong, Lexy J. (2010), Metodologi penelitian kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung
- Mulyadi D. 2015. Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik. Alfabeta. Bandung
- Nugroho, Riant, D, 2008. Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Nurcholis H. 2007. Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Grasindo. Jakarta
- Ndraha, Talizuduhu. 2008. Pembangunan Masyarakat, Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas. Jakarta: PT. Bina Aksara. Yogyakarta.
- Poerwadarminta. 2007. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: PN Balai. Pustaka
- Siagian,P. Sondang, 2008, Administrasi Pembangunan, Konsep, Dimensi dan. Strateginya, Bumi Aksara, Jakarta
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suryono, Agus. 2010. Teori dan Isu Pembangunan. Malang: Universitas Malang Press.
- Soewignjo,2005. Administrasi Pembangunan Desa dan Sumber-sumber Pendapatan Desa, Ghalia Indonesia, cetakan 10 Jakarta.
- Todaro, Michael P. 2010. Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga. Jakarta: Erlangga
- Widodo Joko. 2012. Analisis Kebijakan Publik.: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik; Bayumedia. Malang
- Wuysang. A. 2014. Bahan Ajar Kebijakan Publik. FISIP Unsrat. Manado
- Sumber Lainnya:
- Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 - Undang-undang No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional
 - <http://manado.tribunnews.com/2017/08/03/tmmd-ke-99-di-desaranolambot-sukses-digelar>)
 - Ari Maryadi. Letda. . 2004. Buletin Teritorial Edisi No. 03 Tahun, Optimalisasi operasi TNI Manunggal Membangun Desa Dalam Percepatan Pembangunan Di Daerah. diterbitkan oleh Staf Umum Teritorial Angkatan Darat.
 - Buku Rencana Kegiatan TMMD ke-84 T.A 2010 di Wilayah Kodim 0212/TS
 - Buku Rencana Umum TNI Manunggal Membangun Desa TA.2010. Buku I,II dan IV
 - Untung. W, S Kapt. Arh. 2010. Memetik nilai lebih TMMD. TNI AD. Jakarta.